



DISHANPAN

RENCANA KERJA

TAHUN 2026

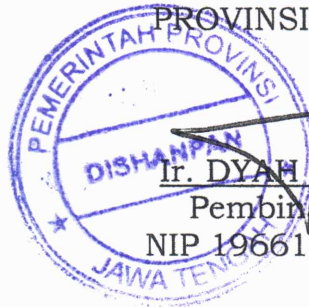


**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2026.

Ungaran, November 2025
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19661016 199203 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan kedalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Renja DISHNAPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026. Dalam penyusunan Renja DISHNAPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 juga diseleraskan dengan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng tahun 2025-2029, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2025-2029, Prioritas Nasional dan Arah Presiden (Asta Cita). Pangantahun 2026 ditetapkan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang tidak hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga fundamental bagi kemandirian dan ketahanan bangsa dan daerah. Kedaulatan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal akses, distribusi, stabilitas harga, dan keadilan bagi petani serta konsumen. Dinas Ketahanan Pangan akan terus menguatkan perannya dalam menjaga ekosistem pangan berjalan selaras dan berkelanjutan.

Prioritas Renja Dinas Ketahanan Pangan (DISHNAPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dengan anggaran yang direncanakan sebesar Rp 45,1 miliar akan diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) melalui penyerapan hasil produksi petani/poktan/gapoktan/pelaku usaha pangan di Jawa Tengah untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi, pemeliharaan dan rehabilitasi gudang cadangan pangan pemerintah; (2) memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan, antara lain melalui subsidi harga

pangan, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan dan kios pangan murah; (3) mengentaskan daerah rentan pangan antara lain melalui subsidi harga pangan daerah rawan pangan dan gaizi serta penyaluran cadangan pangan pemerintah pada daerah rawan pangan (4) penyelamatan pangan antara lain melalui sosialisasi/aksi gerakan penyelamatan pangan, fasilitasi sarana pengangkutan penyelamatan pangan (5) peningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang antara lain melalui fasilitasi alat pengolah pangan lokal bagi pelaku usaha/umkm, promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal, sosialis/edukasi/promosi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), subsidi harga pangan lokal; (6) Penjaminan mutu dan keamanan pangan segar antara lain melalui edukasi keamanan dan mutu pangan, subsidi harga pangan organik, pembinaan pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), pengawasan keamanan pangan segar di post market dan SPPG, sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan serta penguatan sarana laboratorium keamanan dan mutu pangan.

Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah ini juga berfungsi sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2026 yang disusun dengan mempertimbangkan upaya akselerasi pencapaian target kinerja secara tuntas bermanfaat bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengutamakan belanja-belanja yang langsung dirasakan masyarakat, efisiensi dan efektif untuk belanja pendukung kegiatan serta memastikan *redliness criteria* (kriteria kesiapan) kegiatan yang akan dilaksanakan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727)
12. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5);

17. SE Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/15/2025 tanggal 20 November 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RBA-RSD Tahun Anggaran 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Memantapkan terselenggaranya program kegiatan prioritas DISHANPAN dan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun yang telah disesuaikan target indikator kinerja dan alokasi anggaran

2. Tujuan

- a. Menetapkan sasaran prioritas, program kegiatan Tahun 2026 yang tertuang dalam arah kebijakan DISHANPAN;.
- b. Memberikan pedoman operasional dalam penyusunan dan perumusan rencana pagu anggaran, target indikator kinerja, rencana kegiatan anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2024

Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

LAMPIRAN Manajemen Risiko Perangkat Daerah

BAB II

EVALUASI RENCANA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024 menggunakan 9 indikator yang dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas), Provinsi Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat ke-2 secara nasional dengan skor 85,34. Seluruh komponen IKP di Jawa Tengah mencatatkan skor di atas 80, yaitu ketersediaan (87,58), keterjangkauan (84,46), dan pemanfaatan (84,26). Hal ini menunjukkan Provinsi Jawa Tengah masuk kategori sangat tahan pangan. Sedangkan capaian IKP kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 menunjukkan terdapat 5 kabupaten/kota yang skornya dibawah 80 yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung dan Bbedes. Untuk mencapai ketahanan pangan yang optimal, tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan harus dipenuhi secara simultan.

Capaian pelaksanaan program kegiatan urusan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) dan Kegiatan (<i>output</i>)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (RPD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	100	100
		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	%	100	100	100	100
	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	22	8	8	100
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	54	18	18	100
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	12	3	3	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	286	93	93	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	36	12	12	100
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Laporan	36	12	12	100
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	9	2	2	100
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah pada perangkat daerah	Dokumen	6	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (RPD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	12	4	4	100
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Laporan	3	1	1	100
	Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	4	4	100
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	%	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	36	12	12	100
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	%	100	100	100	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	36	12	12	100
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Laporan	36	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	12	12	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Laporam	3	1	1	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	36	4	4	100
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Dokumen	36	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	36	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (RPD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Unit	43	70	70	100
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	30	70	70	100
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Laporan	108	36	36	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	36	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	36	12	12	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	36	12	12	100
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Unit	220	66	66	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	72	24	24	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	5	2	2	100
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	140	40	40	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (RPD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	70	60	84	140
		Rasio penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi	Angka	0,07	0,50	0,65	130
		Rata-rata ketercukupan pangan	Angka	1,25	1,25	2	160
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/ kapita/ tahun	87,60	87,80	87,80	100
		Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah (DRP)	kg/ kapita/ tahun	87,60	87,80	87,80	100
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen rekomendasi ketersediaan pangan yang diusulkan	Dokumen	1	1	1	100
		Prosentase sasaran stabilisasi harga sesuai dengan SOP	%	100	100	100	100
		Persentase peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi harga	%	5	5	36,02	720,40
	Sub Kejiata Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah dokumen pelaksanaan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah	Dokumen	36	13	13	100
		Volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan	Ton	1.250	950	1.010,40	106,36
		Lembaga Usaha pangan masyarakat yang difasilitasi	Kelompok	30	10	65	650
	Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah informasi harga pangan	Dokumen	9	12	12	100
		Jumlah intervensi harga pangan	Paket	36	3	3	100
	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Jumlah laporan ketersediaan pangan yang disusun	Dokumen	36	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (RPD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase peningkatan volume cadangan pangan pemerintah provinsi	%	5	5	36,12	722,40
	Sub Kegiatan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang dikelola	Ton	258	420	647,74	154,22
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rekomendasi ketersediaan sumberdaya pangan lokal yang disusun	Dokumen	3	1	1	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok / pelaku usaha pengembangan pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal yang difasilitasi	Kelompok	85	25	25	100
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	PPH Kab / Kota > 87	Angka	35	33	34	103,03
		PPH Kab / Kota > 87 (DRP)	Angka	35	33	34	103,03
	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah lokasi yang diberikan promosi/edukasi B2SA dan pangan lokal	Lokasi	37	10	10	100
		Jumlah Paket Bahan Pangan Lokal Yang Dibagikan / Dibantukan	Paket	14.500	2.250	2.272	100,98
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah desa B2SA di daerah rawan pangan yang difasilitasi	Desa	72	12	12	100
		Jumlah desa B2SA yang difasilitasi	Desa	17	3	3	100
		Jumlah dokumen analisis PPH	Dokumen	3	1	1	100
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	84	80	94,59	118,24

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (RPD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	%	80	80	91	113,75
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun	Dokumen	3	1	0	0
		Prosentase kelompok / pelaku usaha yang penerapan hygiene sanitasinya meningkat levelnya	%	25	15	15	100
		Jumlah dokumen rekomendasi keamanan pangan segar yang disusun	Dokumen	3	1	1	100
		Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	%	70	65	88,10	135,54
		Jumlah sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan pada balai	Dokumen	6	2	2	100
	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah lokasi pengawasan ijin edar	Lokasi	160	40	45	115
		Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	Orang	950	300	450	150
		Jumlah sampel pangan segar yang diawasi	Sampel	850	300	574	191,33
	Sub Kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah kelompok yang didampingi dalam penyusunan doksistu	Kelompok	19	7	10	142,86
		Jumlah pelaku usaha yang dibina dalam penerapan hygiene sanitasi	Kelompok	67	18	18	100
	Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Sampel Pangan yang Diuji	Sampel	310	150	509	339,33
	Sub Kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah dokumen sertifikat dan/atau registrasi yang diterbitkan	Dokumen	116	55	119	216,36

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Akhir Capaian Program (RPD) Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024		
					Target Program Kegiatan Renja PD	Realisasi Renja PD s.d Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	%	0,01	0,01	0,12	1200
	Kegiatan Persentase penurunan daerah rawan pangan dan gizi	Presentase penanganan daerah rawan pangan	%	6	2,5	12,12	484,80
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Tersusunnya peta Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	3	1	1	100
		Jumlah rekomendasi kebutuhan kerawanan pangan lintas sektor	Dokumen	3	1	1	100
		Jumla peta FSVA yang disusun	Dokumen	3	1	1	100
		Tersusunnya dokumen menejemen food loss dan atau food waste	Dokumen	3	1	1	100
		Jumlah Desa Rawan Pangan dan Gizi yang difasilitasi	Desa	72	22	22	100
		Jumlah desa Stunting yang diintervensi	Desa	55	15	15	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah

Analisis capaian kinerja mendeskripsikan keterkaitan capaian kinerja program kegiatan dengan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis capaian kinerja juga menggambarkan kemajuan dan kendala yang dijumpai untuk dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa mendatang. Capaian kinerja indikator Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 mengacu pada Renstra RPD Tahun 2024-2026. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan sebagian besar mencapai target yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SAT	TAHUN 2024		
				TARGET	CAPAIAN	%
A	INDIKATOR TUJUAN					
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (I)	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83	85,34	102,82
2	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah (PE)	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83	85,34	102,82
3	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Angka	82	80,85	98,60
B	INDIKATOR SASARAN					
1	Meningkatkan Keterjangkauan Pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	5	10,8	216,2
		Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	9,4	6,9	137,03
2	Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Angka	94,50	93,60	99,05
3	Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/ kapita/ hari	3.797	3.805	100,21
4	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	82	91	110,98
5	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	Angka	2,95	3,09	104,75

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah:

1. Indikator Tujuan pertama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan FSVA. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Semakin tinggi capaian IKP (diatas 60) maka daerah tersebut dikategorikan tahan pangan maupun sangat tahan pangan. Nilai IKP Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 yang didapatkan dari perhitungan Badan Pangan Nasional menggunakan 9 indikator adalah 85,34 melebihi target yang ditetapkan yaitu 83. Hasil capaian IKP tersebut menjadikan Provinsi Jawa Tengah secara nasional menduduki peringkat ke-2 setelah Provinsi Bali.
2. Indikator Tujuan kedua adalah Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah). Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah alat ukur yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan menuju tata kelola yang baik dan bersih (good and clean government). Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi nilai Indeks RB, semakin baik tingkat keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi tersebut. Target Indeks RB Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 adalah 82 sedangkan hasilnya adalah 80,85 termasuk dalam kategori penilaian "A" (Memuaskan) dengan interpretasi memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah:

Dari 5 (lima) Indikator Sasaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024 yang tidak tercapai adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Jawa Tengah dengan capaian 99,05%. Capaian PPH Jawa Tengah Tahun 2024 adalah 93,6 turum dari tahun 2023 yaitu 94,2. PPH tahun 2024 masih didominasi oleh kelompok bahan

pangan padi-padian (beras), sedangkan kelompok bahan pangan yang belum memenuhi ketersediaan idealnya yaitu pada kelompok bahan pangan hewani dengan skor 22,5 (dari 24), bahan pangan umbi-umbian dengan skor 1 (dari 2,5), bahan pangan kacang-kacangan dengan skor 7,9 (dari 10) dan kelompok bahan pangan buah/biji berminyak dengan skor 0,4 (dari 1,0)

Sedangkan Indikator Sasaran dengan ketercapaian tertinggi adalah Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan dengan capaian 216,2%. Berdasarkan hasil analisa FSVA Tahun 2024 didapatkan hasil daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3 sebanyak 24 kecamatan (4,17 %) dan daerah tahan rawan pangan prioritas 4-6 sebanyak 552 kecamatan (95,83 %). Terjadi penurunan daerah rentan rawan pangan (prioritas 1-3) yang signifikan yaitu sebanyak 13 kecamatan (35,13 %) jika dibandingkan dengan hasil analisa FSVA tahun 2023 sebanyak 37 kecamatan. Penurunan terbesar terjadi di prioritas 3 (agak rentan pangan) yaitu sebanyak 9 kecamatan.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan isu strategis bagi Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki potensi pertanian besar dengan luas lahan pertanian mencapai sekitar 1,5 juta hektar, yang sebagian besar terdiri dari tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai (BPS Jawa Tengah, 2024). Provinsi Jawa Tengah juga menjadi salah satu penghasil utama beras nasional dengan kontribusi sekitar 11% dari total produksi beras Indonesia. Berbagai tantangan seperti keterbatasan lahan, perubahan iklim, fluktuasi harga, dan tingginya biaya produksi masih mempengaruhi kesejahteraan petani. Salah satu tantangan besar adalah menjaga stabilitas harga pangan akibat fluktuasi harga pangan. Inflasi harga pangan yang tinggi akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, terutama masyarakat di daerah pedesaan, daerah rawan pangan, daerah sulit/terbatas akses pangan/pasarnya. Harga pangan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai ketahanan pangan di Jawa Tengah. Secara umum, dinamika harga komoditas utama di provinsi ini cukup fluktuatif. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur pasar, kebijakan pemerintah, dan kondisi alam. Tantangan lain adalah tingkat kemiskinan yang masih tinggi mencapai 9,58% pada tahun 2024 dan prevalensi kekurangan gizi kronis yang mencapai 17,1%. Ketersediaan komoditas pangan strategis menjadi indikator penting untuk menilai kondisi ketahanan pangan suatu daerah. Di Jawa Tengah, ketersediaan pangan tercatat dinamis, mengikuti tingkat produksi dan permintaan pasar. Meskipun ketersediaan dapat dipenuhi melalui produksi lokal maupun perdagangan antarprovinsi dan impor, angka surplus ini perlu dilihat lebih dalam. Ketersediaan pangan strategis, Fluktuasi harga pangan strategis, prevalensi kekurangan konsumsi pangan (PoU), serta

food loss dan food waste menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di Jawa Tengah memerlukan strategi holistik, terpadu dan saling terkait yang mampu mengatasi tantangan dalam pengendalian inflasi, kemiskinan, penanganan daerah rawan, peningkatan konsumsi pangan lokal, peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat serta pengawasan dan peningkatan mutu dan keamanan pangan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Mewujudkan Ketahanan Pangan sebagaimana Rancangan awal RKPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah tahun 2026 merupakan rangkaian tahapan pencapaian Visi Misi Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2025-2030.

Berkaitan dengan kewenangan DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi isu strategis ketahanan pangan yang ada, diperlukan kolaborasi sinergis antara pemangku kepentingan utama: Akademisi, Bisnis (Pelaku Usaha), Komunitas, Pemerintah (Government), dan Media dalam pembangunan ketahanan pangan baik itu dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan maupun proses evaluasi pembangunannya.

DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah sebagai perangkat daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan Pangan. Tugas DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 sangat kompleks sehingga membutuhkan dukungan sumberdaya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang memadai. Pagu anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah yang dialokasi untuk DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 sebesar Rp. 45.169.295.000,-. Dengan alokasi anggaran tersebut maka pendekatan efesiesi dan efektifitas dalam penyusunan rancangan program/kegiatan harus benar-benar cermat. Dari tabel analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 sudah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila terjadi perubahan asumsi dinamika ekonomi makro daerah (seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau perubahan kebijakan fiskal dan moneter pusat), asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah maka akan dilakukan perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

PROGRAM / KEGIATAAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
		TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF
		VOL.	SAT.	Rp	VOL.	SAT.	Rp
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH				45.169.295.000			45.169.295.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				45.169.295.000			45.169.295.000
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN				45.169.295.000			45.169.295.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	87	%	811.014.000	87	%	811.014.000
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	Dokumen	40.000.000	1	Dokumen	40.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	%	42.600.000	100	%	42.600.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	24	Laporan	488.319.000	24	Laporan	488.319.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	11	Unit	240.095.000	11	Unit	240.095.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	87	%	23.007.156.000	87	%	22.775.156.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	3	Dokumen	14.863.531.000	3	Dokumen	14.873.531.000
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	1	Dokumen	114.000.000	1	Dokumen	114.000.000
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	12	Laporan	6.000.000	12	Laporan	6.000.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	100	%	46.000.000	100	%	50.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	100	%	710.901.000	100	%	720.901.000

PROGRAM / KEGIATAAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
		TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF
		VOL.	SAT.	Rp	VOL.	SAT.	Rp
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	30	Unit	1.041.200.000	30	Unit	635.200.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	24	Laporan	2.884.341.000	24	Laporan	2.884.341.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	77	Unit	3.341.183.000	77	Unit	3.491.183.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	90	%	388.000.000	90	%	400.000.000
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	100	%	388.000.000	100	%	400.000.000
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rawan Pangan	14,6	%	4.925.924.000	14,6	%	4.975.924.000
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12	Dokumen	1.605.205.000	12	Dokumen	1.633.205.000
	PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI	6	%	3.003.402.000	6	%	3.025.402.000
	Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan	3	%	317.317.000	3	%	317.317.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	62,5	%	6.626.106.000	62,5	%	6.654.106.000
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan	10	Angka	377.226.000	10	Angka	377.226.000
	Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	100	%	3.110.440.000	100	%	3.138.440.000
	Volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan	725	Ton	3.138.440.000	725	Ton	3.138.440.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	0,47	Angka	5.000.529.000	0,47	Angka	5.025.529.000
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase penyaluran cppd	50	%	5.000.529.000	50	%	5.025.529.000

PROGRAM / KEGIATAAN	INDIKATOR KINERJA	RANCANGAN AWAL RKPD			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
		TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF	TARGET CAPAIAN		PAGU INDIKATIF
		VOL.	SAT.	Rp	VOL.	SAT.	Rp
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rata-rata Ketersediaan Pangan	1,21	Angka	70.860.000			70.860.000
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan	1	Dokumen	70.860.000	1	Dokumen	70.860.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	87,3	kg/ kapita/ tahun	1.785.500.000	87,3	kg/ kapita/ tahun	1.864.500.000
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	jumlah kelompok / pelaku usaha pengembangan pangan olahan lokal yang difasilitasi	10	Kelompok	966.135.000	10	Kelompok	1.006.835.000
	Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA	42	%	308.690.000	42	%	346.990.000
	Jumlah Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal	7	Kali	510.675.000	7	Kali	510.675.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	40	%	1.651.085.000	40	%	1.657.085.000
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) yang diterbitkan	100	Dokumen	1.434.085.000	100	Dokumen	1.437.085.000
	Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan	80	%	217.000.000	80	%	220.000.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90,1	%	903.121.000	90,1	%	935.121.000
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN	1	Dokumen	140.000.000	1	Dokumen	150.000.000
	Jumlah Pelaku usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan	50	Kelompok	320.743.000	50	Kelompok	338.743.000
	Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	84	%	442.378.000	84	%	446.378.000

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam forum Musrenbang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 fokus pada penguatan swasembada pangan untuk menjadikan Jateng sebagai lumbung pangan nasional, peningkatan infrastruktur pendukung pertanian, penanganan kemiskinan dan stunting dan penanganan sampah. Pada saat dilakukan Musrenbang tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tidak terdapat/mendapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk diakomodir lebih lanjut kedalam kegiatan tahun 2026.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah menyelenggarakan berbagai kebijakan, diantaranya melalui program peningkatan dan penguatan ketahanan pangan di Indonesia. Ketahanan pangan dapat meliputi segala aspek baik dari pengelolaan, pemanfaatan, pemerataan, stabilitas sistem pangan, mutu dan kualitas pangan. Ketahanan pangan merupakan tantangan kompleks bagi pemerintah dalam penguatan ketahanan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia secara merata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam konteks global dan nasional, terutama bagi negara-negara dengan populasi besar dan beragam seperti Indonesia. Konsep ketahanan pangan melibatkan beberapa dimensi utama yang saling terkait, yang semuanya perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan sebuah sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah bahkan suatu negara, karena pangan merupakan sumber bahan pokok bagi masyarakat

RPJMN 2025-2029 Pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang dituangkan dalam Perpres No.12 Tahun 2025 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.

Asta Cita adalah delapan agenda strategis pemerintahan yang menjadi arah pembangunan nasional. Salah satu pilar penting dalam Asta Cita 2024–2029 adalah mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta penguatan sektor ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam kerangka ketahanan pangan, strategi pemerintah menekankan pembangunan lumbung pangan dari desa hingga nasional, sebagai langkah konkrit mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan pokok.

Pemerintah mendorong sejumlah inisiatif strategis dalam mengakselerasi ketahanan pangan nasional, di antaranya:

1. Revitalisasi sektor pertanian dan perikanan berbasis desa dan daerah;
2. Penguatan infrastruktur pangan seperti irigasi, gudang penyimpanan, dan distribusi logistik;
3. Pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan lokal;
4. Pengembangan teknologi pertanian modern untuk peningkatan produktivitas;
5. Kolaborasi lintas sektor antara pusat dan daerah, serta dengan dunia usaha dan akademisi;
6. Diversifikasi pangan guna memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

Pemerintah pusat terus memberi dukungan kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota termasuk Provinsi Jawa Tengah untuk terus berkontribusi pada ketahanan pangan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Secara umum indikator tujuan Dinas Ketahanan Pangan yang mendukung kedalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang termuat pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah Indeks Ketahanan Pangan dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan / PoU (Prevalence of Undernourishment). Untuk mendukung kedua indikator kinerja daerah tersebut dituangkan kedalam Indikator Kinerja Program pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, dan Renja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pangan saat ini tengah dihadapkan pada tantangan meningkatnya permintaan, baik jumlah maupun keragaman bahan pangan, termasuk untuk pakan, bioenergi, dan lain-lain. Sementara di sisi penyediaan pangan, dihadapkan pada terjadinya stagnasi/penurunan produksi komoditas pangan seperti produksi padi, serta masih relatif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan, diantaranya kedelai, daging sapi-kerbau, bawang putih, dan gula. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan musim tanam dan panen tidak merata juga menjadi tantangan tersendiri untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan antar waktu dan antar wilayah.

Permasalahan lain yang masih dihadapi antara lain produktivitas lahan yang mengalami levelling off, konversi lahan pertanian dan pangan serta degradasi air, terjadinya perubahan iklim dan cuaca global, stabilitas harga pangan dunia yang cenderung berfluktuasi, tingginya susut dan sisa pangan atau food loss dan waste, pergeseran pola konsumsi pangan ke arah western diet, fast food dan industrial food, serta jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah, serta kurang beragam akibat keterbatasan daya beli. Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat

perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan berdaulat. Untuk melihat ketahanan pangan hingga level individu dapat dilihat berdasarkan kondisi ketidakcukupan konsumsi pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU). PoU menjadi indikator penting yang mencerminkan tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan, sekaligus alat untuk memetakan kondisi kerawanan pangan. “PoU merupakan ultimate target dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Targetnya, pada 2029 angka PoU Nasional turun menjadi 4,41 persen. PoU telah menjadi indikator kinerja pemerintah pusat dan daerah tahun 2025-2029. Pada tahun 2024, terdapat 8,27% penduduk Indonesia yang mengalami prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU), sedangkan untuk Provinsi Jawa Tengah terdapat 8,63% penduduk yang mengalami prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau tertinggi kedua di pulau jawa setelah Provinsi D.I. Yogyakarta. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan tersebut, Badan Pangan Nasional menyusun kebijakan dan langkah-langkah antara lain pemenuhan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan pemanfaatan pangan melalui konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) agar hidup sehat, aktif, dan produktif. Perbaikan angka PoU di Indonesia terjadi seiring dengan upaya meningkatkan akses pangan rumah tangga, khususnya pada wilayah rentan/rawan pangan. Bahwa eratnya hubungan antara kerawanan pangan dan kemiskinan. “Pengentasan kemiskinan akan berdampak signifikan terhadap pengurangan masyarakat rawan pangan. Pangan adalah kebutuhan dasar yang harus tersedia, terjangkau, dan bergizi seimbang bagi seluruh rakyat,

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan Daerah Bidang Pangan di Provinsi Jawa Tengah merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan Ketahanan Pangan agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan kebijakan nasional yang termuat dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan tahun 2026, yang terinci pada Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Renja 2026
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah		Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85.6
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	7.83
		Meningkatkan Keterjangkauan Pangan	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	%	8

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Renja 2026
			Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	%	8
		Meningkatkan Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Angka	94.5
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/ kapita/ hari	3.625
2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Ketahanan Pangan		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	75.6
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	85.5
		Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan	Angka	2.92

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Renstra DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih dan kebijakan Prioritas Nasional (Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden) tahun 2025-2029. Program prioritas dilaksanakan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah pada satu urusan wajib non pelayanan dasar yaitu urusan pemerintah bidang pangan dengan kebutuhan anggaran tahun sebesar Rp 45.169.295.000,- yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 4 program:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 13.614.995.000,-
- b. Program Pengawasan Keamanan Pangan sebesar Rp. 2.592.206.000,-.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp 4.975.924.000,-.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Rp 23.986.170.000.

Rincian rencana program kegiatan beserta indikator, target tujuan, program, kegiatan, sub kegiatan beserta pagu indikatif APBD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 diuraikan pada Tabel 4.1. Rencana Kerja, Pendanaan, Sasaran Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (risk appetite). Organisasi akan menyusun dan memutakhirkan register risiko (risk register), yaitu sebuah daftar atas semua risiko signifikan yang mungkin berdampak pada kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD. Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 dan 4. Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (pernyataan risiko, skala risiko, penyebab risiko, dampak risiko, rencana tindak lanjut atas risiko, pemilik risiko

dan target waktu penyelesaian) yang tertuang pada Tabel 4.2. Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

4.3. Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Mendukung Program Daerah

Pemprov Jateng berupaya mewujudkan visi “Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” dengan mencanangkan 136 program, yang terdiri dari 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi dan 42 program taktis. Berbagai program itu tentunya selaras dengan Asta Cita Presiden RI. Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang masuk kedalam 136 Program Daerah adalah Subsidi Pangan Murah.

Tabel 4.3 Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Yang Mendukung 136 Program Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

No.	Program/ Kegiatan/	Sub Kegiatan	Output	Target Tahun 2026	Rencana Aktivitas Riil	136 Program Daerah
1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Bahan pangan yang didistribusikan untuk stabilisasi pasokan	3 Laporan	Fasilitasi Distribusi	Subsidi Pangan Murah
		Sub Kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	2 Laporan	Subsidi Harga Pangan Murah untuk Produsen dan Konsumen	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Dokumen	Subsidi Harga Pangan Lokal	
	Program Penanganan Kerawanan Pangan; Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan	Sub Kegiatan Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	Subsidi Harga Pangan Rawan Pangan	

No.	Program/ Kegiatan/	Sub Kegiatan	Output	Target Tahun 2026	Rencana Aktivitas Riil	136 Program Daerah
	Kewenangan Provinsi		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	2 Laporan	Subsidi Harga Pangan Rawan Gizi	
	Program Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan Dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	Subsidi Harga Pangan Aman dan Bermutu	

Tabel 4.1. Rencana Kerja, Pendanaan, Sasaran Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis di Dinas Ketahanan Pangan													23.986.170.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan										Angka	75,6		Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan											23.586.170.000	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan								Angka	85,5	23.586.170.000	Dinas Ketahanan Pangan
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								23.586.170.000	
						Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan					%	87	811.014.000	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						40.000.000	
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.03.0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				40.000.000	
										Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	40.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						42.600.000	
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	42.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.000.000	
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	9.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				8.000.000	
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	8.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	5.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06.0008					Fasilitas Kunjungan Tamu				10.600.000	
										Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	10.600.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000	
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	10.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						488.319.000	
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	24	488.319.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				198.000.000	
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	198.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				290.319.000	
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	290.319.000	SUB BAGIAN TATA USAHA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						240.095.000	
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	11	240.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				109.095.000	
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	109.095.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
				X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				131.000.000	
										Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	131.000.000	SUB BAGIAN TATA USAHA
							Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan				%	87	22.775.156.000	SEKRETARIAT
				X.XX.01.1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.873.531.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun			Dokumen	3	14.873.531.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.02.0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14.317.257.000	
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	95	14.317.257.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.02.0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				376.274.000	
										Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	376.274.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.02.0003					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				180.000.000	
										Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	180.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						114.000.000	
								Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah			Dokumen	1	114.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.03.0002					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				100.000.000	
										Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2	100.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.03.0006					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				14.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	14.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.04			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						6.000.000	
								Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah			Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.04.0007					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah				6.000.000	
										Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	6.000.000	SUB BAGIAN KEUANGAN
				X.XX.01.1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.000.000	
								Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan			%	100	50.000.000	
				X.XX.01.1.05.0003					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				50.000.000	
										Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	12	50.000.000	
				X.XX.01.1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						720.901.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan			%	100	720.901.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46.000.000	
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	46.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000	
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	60.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.0005					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				48.000.000	
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	48.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu				145.600.000	
										Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	145.600.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				325.000.000	
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	325.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.06.0010					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				9.000.000	
										Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	9.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				X.XX.01.1.06.0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				87.301.000	
										Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	87.301.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						635.200.000	
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan			Unit	30	635.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.07.0010					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				635.200.000	
										Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	30	635.200.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.884.341.000	
								Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun			Laporan	24	2.884.341.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	240.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.644.341.000	
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.644.341.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.491.183.000	
								Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan			Unit	77	3.491.183.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				210.000.000	
										Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	210.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				X.XX.01.1.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				3.081.183.000	
										Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	3.081.183.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				X.XX.01.1.09.0010					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000	
										Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	50	200.000.000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan											400.000.000	
			Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan								Angka	2,92	400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
				X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								400.000.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
						Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan					%	90	400.000.000	SEKRETARIAT
				X.XX.01.1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						400.000.000	
								Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan			%	100	400.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
				X.XX.01.1.01.0001					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				250.000.000	
										Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	250.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
				X.XX.01.1.01.0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				130.000.000	
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	130.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
				X.XX.01.1.01.0008					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000	
										Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				X.XX.01.1.01.0010					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				10.000.000	
										Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	10.000.000	SUB BAGIAN PROGRAM
Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah													21.183.125.000	Dinas Ketahanan Pangan
	Indeks Ketahanan Pangan										Angka	85,6		Dinas Ketahanan Pangan
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)										%	7,83		Dinas Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Keterjangkauan Pangan											11.630.030.000	
			Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan								%	8	4.975.924.000	Dinas Ketahanan Pangan
				2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								4.975.924.000	
						Persentase Daerah Rawan Pangan					%	14,6	4.975.924.000	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
				2.09.04.1.02			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						4.975.924.000	
								Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi			Dokumen	12	1.633.205.000	Pokja Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				2.09.04.1.0 2.0005					Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				1.633.205.000	
										Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen	2	1.633.205.000	Pokja Kewaspadaan Pangan dan Gizi
								PERSENTASE PENANGANAN DESA RAWAN PANGAN DAN GIZI			%	6	3.025.402.000	Pokja Kerawanan Pangan
				2.09.04.1.0 2.0002					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				275.000.000	
										Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	2	275.000.000	Pokja Kerawanan Pangan
				2.09.04.1.0 2.0004					Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				2.750.402.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan	1	2.750.402.000	Pokja Kerawanan Pangan
								Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan			%	3	317.317.000	Pokja Penyelamatan Pangan
				2.09.04.1.0 2.0003					Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				317.317.000	
										Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	317.317.000	Pokja Penyelamatan Pangan
			Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)								%	8	6.654.106.000	Dinas Ketahanan Pangan
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								6.654.106.000	
						Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku					%	62,5	6.654.106.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.0 1			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						6.654.106.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								Persentase peningkatan kelembagaan usaha pangan			Angka	10	377.226.000	Pokja Pascapanen dan Kelembagaan Usaha Pangan
				2.09.03.1.0 1.0011					Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi				377.226.000	
										Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	10	377.226.000	Pokja Pascapanen dan Kelembagaan Usaha Pangan
								Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP			%	100	3.138.440.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
				2.09.03.1.0 1.0009					Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				3.138.440.000	
										Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	Laporan	2	3.138.440.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
								VOLUME BAHAN PANGAN YANG DIFASILITASI PENDISTRIBUSIANNYA UNTUK STABILISASI PASOKAN			Ton	725	3.138.440.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
				2.09.03.1.0 1.0003					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				3.138.440.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
										Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	3	3.138.440.000	Pokja Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan											5.096.389.000	
			Angka Ketersediaan Energi (AKE)								kkal/kapita/hari	3625	5.096.389.000	Dinas Ketahanan Pangan
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								5.096.389.000	
						Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)					Angka	0,47	5.025.529.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
				2.09.03.1.02			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						5.025.529.000	
								persentase penyaluran cppd			%	50	5.025.529.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan
				2.09.03.1.02.0005					Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				5.025.529.000	
										Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton	320	5.025.529.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan
						Rata-rata Ketersediaan Pangan					Angka	1,21	70.860.000	Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				2.09.03.1.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						70.860.000	
								Jumlah Dokumen Rekomendasi Ketersediaan Pangan Yang Diusulkan			Dokumen	1	70.860.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan
				2.09.03.1.01.0013					Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				70.860.000	
										Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	2	70.860.000	Pokja Ketersediaan dan Cadangan Pangan
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan											4.456.706.000	
			Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah								Angka	94,5	4.456.706.000	Dinas Ketahanan Pangan
				2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								1.864.500.000	
						Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah					kg/kapita/tahun	87,3	1.864.500.000	Bidang Pengankaragaman dan Konsumsi Pangan
				2.09.03.1.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						1.353.825.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								JUMLAH KELOMPOK / PELAKU USAHA PENGEMBANGAN PANGAN OLAHAN LOKAL YANG DIFASILITASI			Kelompok	10	1.006.835.000	Pokja Pengembangan Pangan Lokal
				2.09.03.1.0 1.0007					Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.006.835.000	
										Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	1	1.006.835.000	Pokja Pengembangan Pangan Lokal
								Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA			%	42	346.990.000	Pokja Pola Konsumsi Pangan B2SA
				2.09.03.1.0 1.0006					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				346.990.000	
										Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	2	346.990.000	Pokja Pola Konsumsi Pangan B2SA
				2.09.03.1.0 4				Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi					510.675.000	
								Jumlah Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal			Kali	7	510.675.000	Pokja Promosi Penganekaragaman Pangan Lokal

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				2.09.03.1.0 4.0001					Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				510.675.000	
										Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	2	510.675.000	Pokja Promosi Penganekaragaman Pangan Lokal
				2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								2.592.206.000	
						Persentase Capaian Tertimbang Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar					%	40	1.657.085.000	Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
				2.09.05.1.0 1			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.657.085.000	
								Jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) yang diterbitkan			Dokumen	100	1.437.085.000	Pokja Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan
				2.09.05.1.0 1.0010					Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1.437.085.000	
										Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1.437.085.000	Pokja Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan
								Persentase rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan yang diterbitkan			%	80	220.000.000	Pokja Sertifikasi dan Registrasi Pangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
				2.09.05.1.0 1.0007					Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				220.000.000	
										Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	51	220.000.000	Pokja Sertifikasi dan Registrasi Pangan
						Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan					%	90,1	935.121.000	Bidang Keamanan Pangan
				2.09.05.1.0 1			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						935.121.000	
								JUMLAH DOKUMEN REKOMENDASI KEAMANAN PANGAN SEGAR YANG DISUSUN			Dokumen	1	150.000.000	Pokja Penanganan Ketidaksiuaian Mutu dan Keamanan Pangan
				2.09.05.1.0 1.0011					Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				150.000.000	
										Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	2	150.000.000	Pokja Penanganan Ketidaksiuaian Mutu dan Keamanan Pangan
								Jumlah Pelaku usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan kewan			Kelompok	50	338.743.000	Pokja Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah
												Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
								pangan						
				2.09.05.1.0 1.0009					Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				338.743.000	
										Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	2	338.743.000	Pokja Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan
								Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran			%	84	446.378.000	Pokja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
				2.09.05.1.0 1.0008					Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				446.378.000	
										Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen	1	446.378.000	Pokja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
JUMLAH													45.169.295.000	

Tabel 4.2 Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan OPD								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	<i>Prevelence of Undernourishment</i> (PoU) Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Ketersediaan dan keterjangkauan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	12	<ul style="list-style-type: none"> Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah) Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan B2SA 	produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan	Pemberian bantuan pangan dan penyaluran komoditas pangan secara kontinyu dan tidak hanya pada komoditas pangan strategis Pemberian subsidi harga pangan untuk masyarakat rawan pangan dan anak berseiko stunting, kegiatan berbagi pangan, koordinasi dengan Bappeda dan OPD untuk penanganan di luar aspek pangan Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA yang lebih masif. Penganekaragaman dalam mengkonsumsi pangan berbahan baku potensi pangan spesifik lokasi, Fasilitasi pelaku usaha pangan lokal. Pengembangan pangan lokal. Gerakan cinta pangan lokal.	Kepala Dinas	2026
		Pangan yang tersedia tidak memenuhi	12	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya edukasi masyarakat 	Masyarakat Mengonsumsi pangan yang	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi keamanan pangan di wilayah POU Tinggi 	Kepala Dinas	2026

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		standar mutu dan keamanan pangan		tentang pangan aman dan bergizi <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan 	tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan dan tindak lanjut hasil surveilan 		
Sasaran Strategis OPD								
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	12	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih, kedelai, gula dan minyak goreng.	Komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam daerah belum mencukupi	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Dinas Teknis Produksi untuk optimalisasi produksi komoditas pangan yang masih kurang Pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak dapat diproduksi sendiri, dengan impor mendatangkan dari daerah lain baik domestik maupun luar negeri 	Kepala Dinas	2026
Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	16	Panjangnya rantai distribusi pangan	Terjadinya inflasi	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2026

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	9	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yang membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	Kepala Dinas	2026
Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah / di atas angka konsumsi ideal	16	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah.	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat	Koordinasi dengan dinas teknis untuk meningkatkan produksi pangan lokal, Rakor analisis skor PPH dengan kabupaten/kota, Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA, Pengenalan pangan lokal substitusi beras dan gandum, promosi pangan lokal melalui media dan pameran, fasilitasi alat bagi pelaku usaha pangan lokal. Pemanfaatan pangan lokal yang lebih masif.	Kepala Dinas	2026
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan								
	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Bahan pangan selain beras belum menjadi prioritas utama dalam pemilihan bahan pangan	9	Kebijakan pemanfaatan pangan lokal sebagai pengganti atau pangan alternatif selain beras belum maksimal	Konsumsi masyarakat menjadi tidak beragam, dan menjadi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan, dan akan	- Peningkatan inovasi promosi pangan lokal -Peningkatan sosialisasi pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui media sosial -Pemberian subsidi harga untuk pangan lokal	Kepala Bidang PKP	1 tahun

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					mempengaruhi skor PPH Provinsi Jawa Tengah			
KEGIATAN								
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Harga komoditas pangan tingkat konsumen melebihi HET/HAP, sedangkan harga komoditas pangan tingkat produsen dibawah HAP	12	Ketidakstabilan harga komoditas pangan	Daya beli masyarakat menurun dan kelangkaan komoditas pangan	Penyaluran subsidi harga pangan dengan menggandeng BUMD Pangan Provinsi Jawa Tengah	Bidang KSP	1 tahun
	Persentase Peningkatan Kelembagaan Usaha Pangan	Belum optimalnya pengembangan kelembagaan usaha pangan	9	Keterbatasan SDM dan Infrastruktur pelaku usaha pangan	Pelaku usaha pangan belum berkembang secara optimal dari aspek produksi dan pemasaran	Meningkatkan kemitraan pelaku usaha pangan dengan stakeholder terkait dari aspek hulu s/d hilir dengan perluasan wilayah jangkauan	Bidang KSP	1 tahun
	Volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan	Volume bahan pangan yang didistribusikan tidak dapat menjaga stabilitas pasokan di setiap wilayah	9	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis	Ketidakstabilan pasokan dan harga	Memperluas jangkauan pendistribusian kepada masyarakat	Bidang KSP	1 tahun
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi	Pola konsumsi masyarakat tidak beragam	12	Ketergantungan dengan salah satu	Menjadikan skor PPH menjadi tidak maksimal dan	Untuk memperluas jangkauan dan sasaran, membuat series	Kepala Bidang PKP	1 tahun

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penguatan Pangan B2SA			bahan pangan (beras)	kurang beragam Status gizi masyarakat menurun	edukasi secara online/daring/zoom meeting		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal	9	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Koordinasi dengan lintas OPD yang mempengaruhi indikator rawan pangan	Kepala Dinas	1 Tahun
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan	Ditemukan produk pangan segar di peredaran yang menyimpang terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT	9	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan keterbatasan jangkauan pengawasan PSAT di peredaran	Kesehatan masyarakat terganggu	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT dan edukasi	Bidang Keamanan Pangan	1 Tahun
	Capaian Tertimbang Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar	Rendahnya ajuan permohonan sertifikasi dan registrasi pangan oleh pelaku usaha	9	Adanya pembagian kewenangan registrasi antara BAPANAS, Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko usaha	Kurangnya informasi dan jaminan mutu yang diperoleh konsumen terhadap produk pangan yang tidak tersertifikasi dan teregistrasi	pengawasan ke pelaku usaha terkait kepatuhan pelaporan dan penjaminan produk pangan yang tersertifikasi dan teregistrasi	Kepala Balai	1 tahun

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar yang Disusun	Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	9	pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih terbatas	Masih banyak masyarakat yang belum tersosialisasi dan tereduksi keamanan dan mutu pangan	Sinergi jejaring sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan dengan lintas OPD dan Kab/Kota serta pemanfaatan media online secara optimal	Bidang Keamanan Pangan	1 Tahun
	Jumlah Pelaku Usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan	Kurang optimalnya pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan post market, pembinaan kepada pelaku usaha PSAT dan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat oleh lembaga pengawas mutu dan keamanan kabupaten/ kota	9	Petugas pengawas pada Lembaga pengawas mutu dan keamanan pangan kabupaten/ kota belum memahami dan menerapkan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan	Masyarakat mengkonsumsi PSAT yang belum memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan kapasitas pengawas pada Lembaga pengawas mutu dan keamanan pangan di kabupaten/ kota	Bidang Keamanan Pangan	1 Tahun
	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Yang Diterbitkan	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	9	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan	pengawasan ke pelaku usaha terkait kepatuhan pelaporan dan penjaminan produk pangan yang tersertifikasi dan teregistrasi	Kepala Balai	1 tahun

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEGIATAN								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terdapat barang milik daerah yang tidak terdata	9	Terdapat aset daerah yang masih dikuasai pihak lain	Operasional aktivitas dapat terganggu	Melakukan rapat koordinasi dan klarifikasi data dengan pemerintah kabupaten/kota terkait aset yang dikuasai atau digunakan, untuk memastikan kepastian hukum dan tanggung jawab pengelolaan aset tersebut	Ka. Subbag Umpeg	1 Tahun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Data kepegawaian tidak terbaru	9	Ketidakteraturan data pegawai	Potensi kesalahan dalam penetapan hak kepegawaian	Melaksanakan kegiatan desk pemutakhiran data pada unit kerja	Ka. Subbag Umpeg	1 Tahun
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang tidak memenuhi standar administrasi	9	Pengadaan tidak sesuai dengan regulasi	Potensi sanksi dan hambatan operasional	Membentuk tim verifikasi administrasi yang memastikan setiap barang yang diterima memiliki dokumen lengkap (BAST, faktur, kontrak, dan bukti pembayaran).	Ka. Subbag Umpeg	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang milik daerah tidak dapat digunakan	9	Pemeliharaan hanya dilakukan ketika barang sudah rusak berat	Efektivitas kerja perangkat daerah menurun	Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin (harian, bulanan, tahunan) untuk setiap jenis aset sesuai karakteristik barang.	Ka. Subbag Umpeg	1 Tahun

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 merupakan penjabaran proses pencapaian tujuan DISHANPAN yang memperhatikan pada pencapaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jateng tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng tahun 2025-2029, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2025-2029, Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2025-2029, Prioritas Nasional dan Arah Presiden (Asta Cita).

Penyusunan Renja Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta akan diperoleh peningkatan kualitas perencanaan sesuai dengan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Selanjutnya Rencana Kerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang secara umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana kerja tahunan yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian.

Renja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 tetap difokuskan pada kegiatan yang mendukung upaya Peningkatan Ketahanan Pangan di Provinsi Jawa Tengah melalui 3 Pilar Ketahanan Pangan, yaitu:

- 1) Aspek Ketersediaan, antara lain berupa a) penyusunan neraca pangan wilayah; b) pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebesar 320ton setara beras yaitu pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan dalam rangka mengantisipasi/menghadapi keadaan darurat, menanggulangi kebutuhan pangan pada daerah rawan/penanganan kemiskinan transien serta untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan; c) fasilitasi alat pengolah pangan lokal bagi pelaku usaha/umkm baik di kecamatan berdaya maupun yang bukan kecamatan berdaya
- 2) Aspek Keterjangkauan, antara lain berupa a) Fasilitasi Distribusi Pangan yaitu fasilitas pembiayaan distribusi (bongkar muat, transportasi dan kemasan) yang diberikan kepada produsen (petani/ peternak/ gapoktan/ poktan/ distributor/ pelaku usaha pangan lainnya) untuk menyalurkan bahan pangan strategis ke masyarakat, dalam rangka pengendalian pasokan dan harga pangan serta penanganan gejolak harga pangan / harga pangan tetap stabil dan terjangkau melalui Kios Pangan Murah, Gerakan Pangan Murah atau intervensi lainnya, b)

Subsidi Harga Pangan Rawan Pangan yaitu Subsidi harga pangan yang dieberikan kepada masyarakat / Rumah Tangga miskin dalam upaya menurunkan Angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment - PoU); c) Subsidi Harga Pangan Rawan Gizi kepada Balita/Ibu Hamil Kurang Energi Kronis; d) Subsidi Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen; e) Edukasi dan Gerakan Pencegahan Pemborosan Pangan dan Penyelamatan Pangan bersama stake holder/lembaga/instansi/asosiasi dan organisasi/penggiat pencegahan food waste serta fasilitasi pengiriman pangan berlebih yang berpotensi terbuang atau dimusnahkan namun masih dalam kondisi layak dan aman serta tidak termasuk pangan sisa/leftover food untuk disalurkan kepada masyarakat / pihak-pihak yang membutuhkan;

3) Aspek Pemanfaatan Pangan dicerminkan oleh konsumsi pangan perseorangan atau rumah tangga yang dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, pola konsumsi pangan, pengetahuan tentang pangan, serta penanganan pangan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberagaman pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi. kuantitas dan kualitas pangan yang dikonsumsi secara langsung akan menentukan tujuan penyelenggaraan pangan yaitu masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan meliputi a) Fasilitasi Rumah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berupa Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi dan Pola Konsumsi Pangan B2SA ke masyarakat, MOOC sekolah cerdas pangan ke sekolah; b) promosi/ pengenalan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada generasi muda/Gen Z (antara lain mie mocaf, tepung mocaf, beras sorgum, beras jagung, beras singkong), lomba kreasi olahan pangan lokal; c) Subsidi harga pangan lokal yaitu pemberian subsidi harga pangan lokal (pengganti beras dan terigu) dengan tujuan produk pangan lokal dapat kompetitif di pasar, mendorong keberlanjutan usaha serta memperkuat produksi dan konsumsi pangan lokal; d) Subsidi harga pangan aman (Subsidi Pangan Organik); e) Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan di Pre dan Post Market serta supplier SPPG, Edukasi Keamanan dan Mutu Pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan; f) Sertifikasi, registrasi, uji keamanan dan mutu pangan.

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi internal dan eksternal serta dilaksanakan pengendalian, pengawasan dan evaluasi secara intensif. Selain itu diperlukan adanya dukungan dan komitmen seluruh sumber daya lingkup DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN

Manajemen Risiko Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

A. Identifikasi Risiko

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tujuan PD	Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Prevalence of Undernourishment (PoU) Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 	Ketersediaan dan keterjangkauan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	Strategis OPD	<ul style="list-style-type: none"> Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah) Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan B2SA 	Produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan	Masyarakat Jawa Tengah
				Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	Strategis OPD	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya edukasi masyarakat tentang pangan aman dan bergizi 		

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan 		
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah Berintegritas dan Dinamis *	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Tidak Optimalnya Kinerja Organisasi	Risiko Strategis	Koordinasi antar unit lemah	adanya tumpang tindih dan keterlambatan program	Dishanpan
2	Sasaran Strategis PD	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	Strategis OPD	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih, kedelai, gula dan minyak goreng.	Komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam daerah belum mencukupi	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	Strategis OPD	Panjangnya rantai distribusi pangan	Terjadinya inflasi	Masyarakat Jawa Tengah
			Persentase Penanganan	Desa Rawan Pangan tidak tertangani	Strategis OPD	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan,	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak	Desa rawan pangan

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kecamatan Rawan Pangan	secara maksimal		sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	dapat turun ke level prioritas rendah	
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Masih terdapat Beberapa kelompok pangan yang masih dibawah / di atas angka konsumsi ideal	Strategis OPD	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat	Masyarakat Jawa Tengah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD	Risiko Reputasi	Terdapat Indikator penilaian dengan skor rendah (kompetensi pelaksana, sarpras, waktu pelaksanaan, dll)	Reputasi OPD terkait pelayanan publik rendah	DISHANPAN
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Kurangnya Pemahaman Unit Pemilik Risiko dalam Penyusunan Register Risiko	Operasional OPD	Kurangnya SDM tersertifikasi pada unit kerja	Risiko tidak teridentifikasi secara maksimal	DISHANPAN
3	Program	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Rata-rata Ketersediaan Pangan	Masih terdapat komoditas pangan yang belum dapat dipenuhi dari produksi sendiri	Operasional OPD	Kondisi geografis, produksi dan distribusi pangan tidak merata di setiap wilayah	Ketidakstabilan stok dan harga pangan	Masyarakat, Pemerintah
			Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CPPD) terhadap target jumlah CBPD	Tidak terpenuhinya target jumlah CPPD sesuai dengan	Operasional OPD	Keterbatasan anggaran, sarpras, harga komoditas bahan pangan	Keterbatasan dalam penanganan rawan pangan	Masyarakat

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			berdasarkan Perbadan 15/2023	Perbapanas 15/2023				
			Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	Terjadinya gejolak harga sesuai dengan mekanisme pasar	Operasional OPD	Harga Komditas Pangan Strategis tidak sesuai dengan HAP	Daya beli masyarakat turun dan terjadi inflasi	Masyarakat, Pemerintah
			Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Bahan pangan selain beras belum menjadi prioritas utama dalam pemilihan bahan pangan	Risiko Kebijakan/Strategis	Kebijakan pemanfaatan pangan lokal sebagai pengganti atau pangan alternatif selain beras belum maksimal	Konsumsi masyarakat menjadi tidak beragam, dan menjadi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan, dan akan mempengaruhi skor PPH Provinsi Jawa Tengah	-OPD -Masyarakat
				Pola konsumsi masyarakat belum beragam	Risiko Operasional	Masyarakat masih menganggap konsumsi beras merupakan prioritas atau utama	Masyarakat menjadi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan untuk konsumsinya	Masyarakat
4	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah dokumen rekomendasi ketersediaan pangan yang diusulkan	Rekomendasi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	Operasional OPD	Kesulitan memperoleh data di lapangan	Tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketersediaan pangan	Masyarakat, Pemerintah
			Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Harga komoditas pangan tingkat konsumen melebihi HET/HAP,	Operasional OPD	Ketidakstabilan harga komoditas pangan	Daya beli masyarakat menurun dan kelangkaan komoditas pangan	Masyarakat, Pemerintah, pelaku usaha

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				sedangkan harga komoditas pangan tingkar produsen dibawah HAP				
			Persentase Peningkatan Kelembagaan Usaha Pangan	Belum optimalnya pengembangan kelembagaan usaha pangan	Operasional OPD	Keterbatasan SDM dan Infrastruktur pelaku usaha pangan	Pelaku usaha pangan belum berkembang secara optimal dari aspek produksi dan pemasaran	Pelaku usaha pangan, masyarakat
			Volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan	Volume bahan pangan yang didistribusikan tidak dapat menjaga stabilitas pasokan di setiap wilayah	Operasional OPD	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis	Ketidakstabilan pasokan dan harga	Masyarakat
5	Kegiatan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Penyaluran CPPD	Penyaluran CPPD tidak dapat mencukupi sesuai dengan usulan	Operasional OPD	Kurang cadangan pangan yang disediakan	kurangnya jumlah lokasi rawan pangan yang bisa diintervensi CPPD	Masyarakat
6	Kegiatan	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi B2SA dan Pangan Lokal	Pelaksanaan Promosi B2SA dan pengenalan pangan lokal tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan	Risiko Kebijakan/Strategis	Dinamika kebijakan dan program dalam pelaksanaan promosi B2SA dan Pengenalan Pangan Lokal	Kegiatan promosi B2SA dan pengenalan Pangan Lokal menjadi tidak maksimal	Masyarakat umum
				Bahan untuk kegiatan pengenalan pangan lokal terbatas	Risiko Kemitraan	Kerjasama dengan penyedia pangan lokal terkendala dengan kapasitas produksi	pelaksanaan pengenalan pangan lokal menjadi tidak maksimal karena	Pelaksana Kegiatan

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							keterbatasan persediaan	
				Kualitas bahan pangan pengenalan pangan lokal kurang baik	Risiko Fraud	Terjadinya markup anggaran dan kolusi dengan penyedia dalam pembelian bahan pengenalan pangan lokal	Menimbulkan kerugian negara, dan bahan pangan pengenalan pangan lokal tidak beragam	Pelaksana Kegiatan Masyarakat Penyedia/Pelaku Usaha Pangan Lokal
				Pameran Pengenalan Pangan Lokal tidak terlaksana	Risiko Operasional	Keterbatasan anggaran untuk pameran pengenalan pangan lokal	Promosi atau kegiatan pengenalan pangan lokal tidak bisa berjalan secara maksimal karena keterbatasan ruang untuk promosi	Pelaksana Kegiatan
				Disinformasi masyarakat mengenai pola konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Risiko Operasional	Belum adanya keseragaman penyampaian materi promosi mengenai pola konsumsi pangan B2SA	Informasi mengenai pola konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya lokal tidak tersampaikan secara baik di masyarakat	masyarakat
				Laporan penjualan barang subsidi untuk pengenalan pangan lokal tidak sesuai dengan perencanaan	Risiko Fraud	Terjadi markup anggaran dan manipulasi laporan jumlah bahan pengenalan pangan lokal yang terjual	Bahan tidak berkualitas dan stok terbatas	Pelaksana Kegiatan Masyarakat
				Bahan Pengenalan Pangan Lokal	Risiko Kepatuhan	Pihak mitra penyalur subsidi, membeli barang	Bahan tidak berkualitas dan	Pelaksana Kegiatan, Mitra

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				yang di Subsidi tidak sesuai dengan spesifikasi		tidak sesuai dengan Juknis	tidak sesuai dengan spesifikasi	Penyalur, Masyarakat
7	Kegiatan	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok/ pelaku usaha pengembangan pangan olahan lokal yang difasilitasi	Bisnis pelaku usaha pangan lokal belum sepenuhnya berkembang secara optimal	Operasional OPD	Captive market olahan pangan lokal belum terbentuk di masyarakat umum	Pemanfaatan stimulan alat guna pengembangan pangan lokal menjadi tidak efektif	Masyarakat umum
			Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi Penguatan Pangan B2SA	Sasaran dan jangkauan edukasi Pola Konsumsi B2SA terbatas	Risiko Kebijakan/Strategis	Dinamika kebijakan anggaran dari pimpinan	Edukasi menjadi tidak maksimal, masyarakat menjadi tidak teredukasi mengenai pola konsumsi B2SA	Pelaksana Kegiatan Masyarakat
				Pola konsumsi masyarakat tidak beragam	Risiko Operasional	Ketergantungan dengan salah satu bahan pangan (beras)	Menjadikan skor PPH menjadi tidak maksimal dan kurang beragam Status gizi masyarakat menurun	Pelaksana Kegiatan masyarakat
8	Program	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal	Operasional OPD	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Desa rawan pangan
9	Kegiatan	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan dan Gizi	Desa Rawan Pangan dan Gizi tidak tertangani secara maksimal	Operasional OPD	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Desa rawan pangan

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase Peningkatan Pangan yang Diselamatkan	Jumlah pangan yang diselamatkan tidak maksimal	Operasional OPD	Keterbatasan jumlah penggiat dan minimnya sarana dalam penyelamatan pangan di Provinsi Jawa Tengah	Jumlah pangan yang diselamatkan rendah	Masyarakat
			Jumlah Rekomendasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Data dukung terlambat didapatkan	Operasional OPD	Koordinasi lintas sektor lemah	Peta SKPG terlambat disusun	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
				Evaluasi penggantian data BNBA terlambat	Operasional OPD	Kabupaten/lintas sektor lambat dalam mengirim data terbaru	Penetapan sasaran terlambat sehingga mempengaruhi waktu penyaluran subsidi	Masyarakat
10	Program	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Kemanan Dan Mutu Pangan	Ditemukan produk pangan segar di peredaran yang menyimpang terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT	Operasional OPD	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan keterbatasan jangkauan pengawasan PSAT di peredaran	Kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
			Capaian Tertimbang Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar	Rendahnya ajuan permohonan sertifikasi dan registrasi pangan oleh pelaku usaha	Operasional OPD	Adanya pembagian kewenangan registrasi antara BAPANAS, Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko usaha	Kurangnya informasi dan jaminan mutu yang diperoleh konsumen terhadap produk pangan yang tidak tersertifikasi dan teregistrasi	Konsumen
11	Kegiatan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk pangan segar teregistrasi yang diawasi di peredaran	Ditemukan produk pangan segar di peredaran yang	Operasional OPD	Pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku	Produk pangan segar di peredaran belum terjamin	Masyarakat Jawa Tengah

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				belum teregistrasi			mutu dan keamanan pangannya	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar yang Disusun	Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	Operasional OPD	pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih terbatas	Masih banyak masyarakat yang belum tersosialisasi dan teredukasi keamanan dan mutu pangan	Masyarakat Jawa Tengah
			Jumlah Pelaku Usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan	Kurang optimalnya pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan post market, pembinaan kepada pelaku usaha PSAT dan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat oleh lembaga pengawas mutu dan keamanan kabupaten/ kota	Operasional OPD	Petugas pengawas pada Lembaga pengawas mutu dan keamanan pangan kabupaten/ kota belum memahami dan menerapkan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan	Masyarakat mengkonsumsi PSAT yang belum memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Masyarakat
			Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Yang Diterbitkan	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	Operasional OPD	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan	Konsumen

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Jumlah LHU (Laporan Hasil Uji) yang diterbitkan	Rendahnya permohonan pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan oleh pelaku usaha	Operasional OPD	Kurangnya komitmen pelaku usaha dalam rangka penjaminan standar keamanan dan mutu melalui pengujian pangan segar asal tumbuhan	Produk pangan segar yang beredar di masyarakat belum sepenuhnya terjamin mutu dan keamanannya	Masyarakat
12	Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Kualitas pelayanan umum dan kepegawaian menurun	Risiko Penunjang OPD	- SDM belum memiliki kompetensi memadai - SOP pelayanan belum diterapkan konsisten	Target indikator kinerja tidak tercapai	dishanpan
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPMKP	Tidak akuratnya laporan dan data pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan BPMKP	Operasional OPD	Data yg disampaikan tidak akurat	Menurunnya tingkat pelayanan umum perangkat daerah di BPMKP	BPMKP
			Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Gaji pegawai kurang	Risiko Operasional	Kesalahan perhitungan gaji pegawai	Penundaan pembayaran gaji dan/atau revisi anggaran	DISHANPAN
			Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	Target Kinerja tidak realistis	Penunjang OPD	Kurangnya perencanaan dalam pemilihan target	Capaian kinerja sulit tercapai atau, jika tercapai, tidak memberikan kontribusi signifikan ke Visi Misi Daerah.	DISHANPAN

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terdapat barang milik daerah yang tidak terdata	Risiko Legal/Hukum	Terdapat aset daerah yang masih dikuasai pihak lain	Operasional aktivitas dapat terganggu	Dishanpan Prov.Jateng
			Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah pada BPMKP	Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah BPMKP	Penunjang OPD	Kurang ketelitian dalam inventaris barang milik daerah	Penyajian dokumen administrasi barang milik daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	BPMKP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Data kepegawaian tidak terbaru	Risiko Penunjang OPD	Ketidakteraturan data pegawai	Potensi kesalahan dalam penetapan hak kepegawaian	Dishanpan Prov.Jateng
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan	Tamu tidak terfasilitasi dengan layak	Risiko Operasional	Ketidaktersediaan bahan logistik	Penurunan reputasi perangkat daerah	Dishanpan Prov.Jateng
			Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan pada BPMKP	Terdapat gangguan pada sarana dan prasarana kantor maupun gangguan eksternal	Penunjang OPD	Peralatan dan perlengkapan kantor sudah tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan organisasi	Terjadinya kekurangan peralatan dan perlengkapan kantor untuk di gunakan dalam kegiatan kantor sehari hari	BPMKP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang tidak memenuhi standar administrasi	Risiko Kepatuhan	Pengadaan tidak sesuai dengan regulasi	Potensi sanksi dan hambatan operasional	Dishanpan Prov.Jateng
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan alat dan bahan laboratorium	Penunjang OPD	Pengadaan alat dan bahan laboratorium mayoritas	Mengurangi kualitas/kuantitas pelayanan pengujian	Laboratorium BPMKP

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			yang disediakan pada BPMKP	yang non TKDN tidak disetujui		merupakan produk impor		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	Pegawai honorer yang sering absen tetap menerima gaji	Risiko Fraud	Manipulasi data absensi tenaga honorer	Kerugian keuangan	Dishanpan Prov.Jateng
			Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun pada BPMKP	Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di BPMKP	Penunjang OPD	Keterlambatan dalam pendistribusian surat; Kenaikan tarif komunikasi, air dan listrik; Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	Penyajian laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tidak tepat waktu dan kurang akuntabel	BPMKP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang milik daerah tidak dapat digunakan	Risiko Operasional	Pemeliharaan hanya dilakukan ketika barang sudah rusak berat	Efektivitas kerja perangkat daerah menurun	Dishanpan Prov.Jateng
			Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan pada BPMKP	Sarana dan prasarana kantor BPMKP banyak yang rusak dan tidak terawat	Penunjang OPD	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor tidak dilakukan secara optimal dan anggaran	Mengganggu dan menghambat aktivitas pekerjaan kantor	BPMKP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Pencairan SPJ Kegiatan tidak dapat dilaksanakan	Risiko Operasional	Sistem keuangan eror	Terganggunya pengelolaan anggaran	OPD
				Penyusunan laporan keuangan tidak sesuai kondisi riil	Risiko Fraud	Manipulasi laporan keuangan oleh oknum tertentu	Potensi kerugian finansial	OPD

No.	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Penyajian data laporan administrasi pendapatan daerah tidak akurat	Risiko Fraud	Manipulasi SPJ Fungsional Pendapatan oleh oknum tertentu	Potensi kerugian Pendapatan Asli Daerah	OPD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Perubahan jadwal perencanaan dan evaluasi	Operasional OPD	Perubahan regulasi	Dokumen perencanaan dan evaluasi tidak selesai tepat waktu	DISHANPAN
				Terdapat salah input anggaran dalam sistem	Operasional OPD	Ketidacermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	DISHANPAN
				Rencana kerja yang disusun tidak sesuai regulasi yang berlaku	Risiko Kepatuhan	Pegawai tidak memperbarui dan/atau memahami regulasi terbaru	Potensi temuan saat pengawasan	DISHANPAN

B. Analisis dan Pengendalian Risiko

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ketersediaan dan keterjangkauan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	3	5	15	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian bantuan Pangan • Pemberian harga subsidi pangan • Penyaluran pangan dari daerah surplus ke daerah minus • Bekerjasama dengan pelaku usaha dengan biaya fasilitasi distribusi pangan • Sosialisasi/ edukasi pangan B2SA dan Diversifikasi pangan lokal 	Belum Memadai	3	4	12
Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	3	5	15	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi keamanan pangan • Surveilans ke pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi dan registrasi keamanan dan mutu pangan 	Belum Memadai	3	4	12
Tidak Optimalnya Kinerja Organisasi	3	3	9	Ada	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan dan anggaran minimal setiap bulan - Memaksimalkan koordinasi melalui WAG 	Memadai	2	2	4
Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	4	4	16	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi bersama dinas terkait untuk pemantauan • ketersediaan pangan di lapangan baik dari sisi hulu maupun hilir • Analisa Ketersediaan Pangan secara berkala untuk mengetahui komoditas yang masih kurang pemenuhannya. • Analisa dilakukan bersama dengan BPS selaku Pembina Data 	Belum Memadai	4	3	12
Harga komoditas	4	5	20	Ada	Intervensi harga	Belum Memadai	4	4	16

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pangan strategis mengalami fluktuasi tajam									
Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	4	3	12	Ada	Subsidi Harga	Belum Memadai	3	3	9
Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah / di atas angka konsumsi ideal	4	5	20	Ada	Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA kepada masyarakat dan anak sekolah, Promosi pangan B2SA dan pangan lokal, Lomba cipta olahan pangan lokal, Lomba sekolah cerdas pangan, promosi melalui video / poster / pameran.	Belum Memadai	4	4	16
Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD	3	4	12	ada	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan OPD mengacu pada ISO 17025:2017, ISO 17065:2012, dan peraturan/Perundang-undangan yang berlaku - Audit akreditasi ISO oleh KAN setiap 5 tahun sekali, dan audit surveilan ISO oleh KAN sebanyak 2 kali dalam 5 tahun - Audit internal ISO setiap tahun - Mengadakan Forum Konsultasi Publik pada saat proses penyusunan Standar Pelayanan 	memadai	3	3	9
Kurangnya Pemahaman Unit Pemilik Risiko dalam Penyusunan Register Risiko	4	4	16	ADA	Sosialisasi Penyusunan Register Risiko setiap tahun	memadai	3	3	9
Masih terdapat komoditas	4	3	12	Ada	Pemantauan ketersediaan komoditas pangan strategis	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pangan yang belum dapat dipenuhi dari produksi sendiri									
Tidak terpenuhinya target jumlah CPPD sesuai dengan Perbapanas 15/2023	4	3	12	Ada	Peningkatan sarpras, kapasitas SDM, jadwal pengadaan sesuai dengan musim panen	Belum memadai	3	3	9
Terjadinya gejolak harga sesuai dengan mekanisme pasar	4	3	12	Ada	Rakor pengendalian gejolak harga, pemantauan harga dengan tim TPID, Gerakan pangan murah	Memadai	3	2	6
Bahan pangan selain beras belum menjadi prioritas utama dalam pemilihan bahan pangan	4	4	16	Ada	-Sudah ada kebijakan terkait dengan pemanfaatan pangan lokal -Sosialisasi mengenai pola konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Belum Memadai	3	3	9
Pola konsumsi masyarakat belum beragam	4	4	16	Ada	- Sosialisasi dan Edukasi Pola Konsumsi Pangan B2SA yang berbasis sumber daya lokal -pameran pengenalan pangan lokal -mengadakan lomba inovasi olahan pangan lokal untuk memberikan informasi dan edukasi olahan pangan lokal yang dikonsumsi sehari-hari	Belum Memadai	3	3	9
Rekomendasi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan	3	3	9	Ada	Survei di lapangan dengan sampel terbatas, berkolaborasi dengan BPS dalam pendataan dan analisis data	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Harga komoditas pangan tingkat konsumen melebihi HET/HAP, sedangkan harga komoditas pangan tingkat produsen dibawah HAP	4	4	16	Ada	Subsidi harga pangan tingkat produsen dan konsumen	Memadai	4	3	12
Belum optimalnya pengembangan kelembagaan usaha pangan	3	3	9	Ada	Meningkatkan kemitraan pelaku usaha pangan dengan pasar maupun stakeholder terkait	Belum memadai	3	3	9
Volume bahan pangan yang didistribusikan tidak dapat menjaga stabilitas pasokan di setiap wilayah	3	3	9	Ada	Bekerjasama dengan pelaku usaha pangan dalam penyediaan dan pendistribusian pangan kepada masyarakat	Belum memadai	3	3	9
Penyaluran CPPD tidak dapat mencukupi sesuai dengan usulan	3	3	9	Ada	Peningkatan jumlah CPPD yang diadakan dan penyesuaian jadwal pengadaan sesuai dengan musim panen	Belum memadai	3	3	9
Pelaksanaan Promosi B2SA dan pengenalan pangan lokal tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan	3	3	9	Ada	Penyesuaian metode promosi dengan memanfaatkan platform media sosial	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bahan untuk kegiatan pengenalan pangan lokal terbatas	3	3	9	Ada	-Mereview penyedia pangan lokal terkait dengan kapasitas produksinya, agar bisa memenuhi permintaan. -Membuat juknis atau perjanjian kerja sama dengan mitra	Memadai	2	2	4
Kualitas bahan pangan pengenalan pangan lokal kurang baik	2	3	6	Ada	Pembelian bahan pengenalan pangan lokal secara purchasing	Memadai	2	2	4
Pameran Pengenalan Pangan Lokal tidak terlaksana	3	4	12	Ada	Perencanaan kegiatan lebih detil dan update informasi kegiatan pameran yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan	Memadai	2	3	6
Disinformasi masyarakat mengenai pola konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	2	4	8	Ada	Pembuatan buku saku mengenai Pola Konsumsi Pangan B2SA berbasis sumber daya lokal	Memadai	1	2	2
Laporan penjualan barang subsidi untuk pengenalan pangan lokal tidak sesuai dengan perencanaan	2	3	6	Ada	-Pembuatan juknis mengenai subsidi harga pangan lokal -pengawasan dan pengawalan terhadap proses pelaksanaan kegiatan	Memadai	1	2	2
Bahan Pengenalan Pangan Lokal yang di Subsidi tidak sesuai dengan spesifikasi	2	3	6	Ada	Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bisnis pelaku usaha pangan lokal belum sepenuhnya berkembang secara optimal	3	3	9	Ada	Perumusan instrumen assestment secara terperinci dan eviden base disertai tinjauan lapangan	Memadai	2	3	6
Sasaran dan jangkauan edukasi Pola Konsumsi B2SA terbatas	3	4	12	Ada	Melakukan kegiatan edukasi secara daring / zoom meeting	Memadai	2	3	6
Pola konsumsi masyarakat tidak beragam	4	5	20	Ada	Edukasi dengan pengenalan pangan lokal, Edukasi pola konsumsi pangan B2SA melalui program Sekolah Cerdas Pangan	belum memadai	3	4	12
Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal	3	3	9	Ada	Subsidi harga pangan	Belum memadai	3	3	9
Desa Rawan Pangan dan Gizi tidak tertangani secara maksimal	3	3	9	Ada	Subsidi harga pangan	Belum memadai	3	3	9
Jumlah pangan yang diselamatkan tidak maksimal	3	3	9	Ada	Fasilitasi penggiat penyelamatan pangan	Memadai	2	3	6
Data dukung terlambat didapatkan	3	3	9	Ada	Menetapkan batas waktu pengumpulan data dukung SKPG	Memadai	2	3	6
Evaluasi penggantian data BNBA terlambat	3	3	9	Ada	Menetapkan batas waktu pengumpulan data evaluasi BNBA	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ditemukan produk pangan segar di peredaran yang menyimpang terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT	4	3	12	Ada	Pengawasan dan pengujian keamanan dan mutu PSAT di peredaran	Memadai	3	3	9
Rendahnya ajuan permohonan sertifikasi dan registrasi pangan oleh pelaku usaha	3	3	9	Ada	Database pelaku usaha kewenangan Provinsi untuk memastikan keseluruhan produknya tersertifikasi dan teregistrasi	Belum memadai	3	3	9
Ditemukan produk pangan segar di peredaran yang belum teregistrasi	4	2	8	Ada	Pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha	Memadai	3	2	6
Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	3	4	12	ada	Edukasi dan promosi melalui media online dan media sosial	Memadai	3	3	9
Kurang optimalnya pelaksanaan penjaminan	4	3	12	Ada	Pelatihan Petugas Pengawas Mutu dan Keamanan Pangan Kab/ Kota, Sosialisasi dan Pelatihan Pelaku Usaha PSAT terkait keamanan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
mutu dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan post market, pembinaan kepada pelaku usaha PSAT dan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat oleh lembaga pengawas mutu dan keamanan kabupaten/ kota					pangan, Penilaian sistem manajemen pengawasan keamanan pangan Kab/ Kota				
Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	3	3	9	Ada	Surveilans ke pelaku usaha yang telah diterbitkan sertifikat jaminan mutu dan keamanan pangan	Belum memadai	3	3	9
Rendahnya permohonan pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan oleh pelaku usaha	3	3	9	Ada	Sosialisasi/promosi terkait pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan kepada pelaku usaha	Belum memadai	3	3	9
Kualitas pelayanan	3	3	9	Ada	-Menetapkan dan mensosialisasikan SOP pelayanan ke seluruh unit kerja	memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
umum dan kepegawaian menurun					- Mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi SDM dari BPSDMD				
Tidak akuratnya laporan dan data pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan BPMKP	3	3	9	Ada	Menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam hal laporan dan data pada pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan BPMKP	Belum memadai	3	2	6
Gaji pegawai kurang	3	4	12	Ada	Melaksanakan rekonsiliasi dan sinkronisasi data pegawai dengan unit kepegawaian	Memadai	2	3	6
Target Kinerja tidak realistis	3	4	12	ADA	Reviu Kinerja Awal untuk perencanaan tahun anggaran mendatang	memadai	3	3	9
Terdapat barang milik daerah yang tidak terdata	3	3	9	Ada	Telah dilakukan identifikasi aset yang dikuasai pihak lain (berada di Kabupaten/kota	Belum memadai	3	3	9
Tidak akuratnya penyajian data pada dokumen administrasi barang milik daerah BPMKP	3	3	9	Ada	Telah dilakukan inventarisasi barang milik daerah secara akurat	Belum memadai	3	2	6
Data kepegawaian tidak terbaru	3	3	9	Ada	Membuat nota dinas terkait pemutakhiran data mandiri	Belum memadai	3	3	9
Tamu tidak terfasilitasi dengan layak	3	4	12	Ada	Menunjuk petugas penanggung jawab tamu yang memastikan kebutuhan dan kenyamanan tamu selama kunjungan	Belum memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terdapat gangguan pada sarana dan prasarana kantor maupun gangguan eksternal	3	3	9	Ada	Dilakukan inventarisasi peralatan dan perlengkapan kantor untuk digunakan dalam kegiatan kantor sehari hari	Belum memadai	3	2	6
Barang tidak memenuhi standar administrasi	3	3	9	Ada	Melakukan review dokumen pengadaan oleh pejabat pengelola BMD sebelum proses pembelian	Belum memadai	3	3	9
Pengadaan alat dan bahan laboratorium yang non TKDN tidak disetujui	3	4	12	Ada	Pembuatan ijin belanja barang non TKDN dilakukan dari awal tahun anggaran	Belum memadai	3	3	9
Pegawai honorer yang sering absen tetap menerima gaji	4	3	12	Ada	Menunjuk pegawai ASN untuk menjadi petugas pengawas absensi	Memadai	2	2	4
Tidak akuratnya penyajian data pada laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di BPMKP	3	3	9	Ada	Menunjuk petugas yang bertanggungjawab dalam pendistribusian surat, Menetapkan target kinerja pegawai kontrak	Belum memadai	3	2	6
Barang milik daerah tidak dapat digunakan	3	3	9	Ada	Melakukan pemeriksaan fisik aset untuk mengetahui kondisi barang (baik, rusak ringan, rusak berat).	Belum memadai	3	3	9
Sarana dan prasarana kantor BPMKP	3	3	9	Ada	Melakukan pemeriksaan fisik aset untuk mengetahui kondisi barang (baik, rusak ringan, rusak berat).	Belum memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala / Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang ada			Skala / Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Ada / Belum Ada	Uraian	Memadai / Belum Memadai	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
banyak yang rusak dan tidak terawat									
Pencairan SPJ Kegiatan tidak dapat dilaksanakan	3	4	12	Ada	Menyediakan formulir/isian data sebagai backup data dan melaksanakan sinkronisasi serta koordinasi antar unit kerja	Memadai	2	3	6
Penyusunan laporan keuangan tidak sesuai kondisi riil	3	4	12	Ada	Melaksanakan rekonsiliasi, sinkronisasi serta koordinasi antar unit kerja	Memadai	2	3	6
Penyajian data laporan administrasi pendapatan daerah tidak akurat	3	4	12	Ada	Menyediakan formulir/isian data dan melaksanakan sinkronisasi serta koordinasi antar unit kerja, verifikasi penggunaan fasilitas untuk PAD	Memadai	2	3	6
Perubahan jadwal perencanaan dan evaluasi	3	3	9	ADA	Perencanaan melalui RKO setiap bulan	memadai	2	2	4
Terdapat salah input anggaran dalam sistem	3	3	9	ADA	Kasubag Program sebagai Verifikator akhir	memadai	2	3	6
Rencana kerja yang disusun tidak sesuai regulasi yang berlaku	3	3	9	ADA	Pegawai dalam Penyusunan Rencana Kerja merujuk pada Surat Edaran dari Kepala BAPPEDA dan adanya verifikator akhir sebelum pengesahan rencana kerja	memadai	2	3	6

C. Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Ketersediaan dan keterjangkauan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	12	Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah) Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan B2SA 	Produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan
Pangan yang tersedia tidak memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	12	Kepala Dinas	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya edukasi masyarakat tentang pangan aman dan bergizi Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan 	Masyarakat mengonsumsi pangan yang tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk
Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	12	Kepala Dinas	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih, kedelai, gula dan minyak goreng	komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam daerah belum mencukupi
Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	16	Kepala Dinas	Panjangnya rantai distribusi pangan	terjadinya inflasi
Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	9	Kepala Dinas	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah
Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah /di atas angka konsumsi ideal	16	Kepala Dinas	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih Rendah	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat.
Harga komoditas pangan tingkat konsumen melebihi HET/HAP, sedangkan harga komoditas pangan tingkat produsen dibawah HAP	12	Bidang KSP	Ketidastabilan harga komoditas pangan	Daya beli masyarakat menurun dan kelangkaan komoditas pangan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Belum optimalnya pengembangan kelembagaan usaha pangan	9	Bidang KSP	Keterbatasan SDM dan Infrastruktur pelaku usaha pangan	Pelaku usaha pangan belum berkembang secara optimal dari aspek produksi dan pemasaran
Volume bahan pangan yang didistribusikan tidak dapat menjaga stabilitas pasokan di setiap wilayah	9	Bidang KSP	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis	Ketidakstabilan pasokan dan harga
Bahan pangan selain beras belum menjadi prioritas utama dalam pemilihan bahan pangan	9	Bidang PKP	Kebijakan pemanfaatan pangan lokal sebagai pengganti atau pangan alternatif selain beras belum maksimal	Konsumsi masyarakat menjadi tidak beragam, dan menjadi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan, dan akan mempengaruhi skor PPH Provinsi Jawa Tengah
Pola konsumsi masyarakat tidak beragam	12	Bidang PKP	Ketergantungan dengan salah satu bahan pangan (beras)	Menjadikan skor PPH menjadi tidak maksimal dan kurang beragam Status gizi masyarakat menurun
Desa Rawan Pangan dan Gizi tidak tertangani secara maksimal	9	Bidang KPG	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah
Ditemukan produk pangan segar di peredaran yang menyimpang terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT	9	Bidang Keamanan Pangan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan keterbatasan jangkauan pengawasan PSAT di peredaran	Kesehatan masyarakat terganggu
Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	9	Bidang Keamanan Pangan	pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih terbatas	Masih banyak masyarakat yang belum tersosialisasi dan tereduksi keamanan dan mutu pangan
Kurang optimalnya pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan post market, pembinaan kepada pelaku usaha PSAT dan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat oleh lembaga pengawas mutu dan keamanan kabupaten/ kota	9	Bidang Keamanan Pangan	Petugas pengawas pada Lembaga pengawas mutu dan keamanan pangan kabupaten/ kota belum memahami dan menerapkan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan	Masyarakat mengkonsumsi PSAT yang belum memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan
Rendahnya ajuan permohonan sertifikasi dan registrasi pangan oleh pelaku usaha	9	Balai Sertifikasi dan Mutu Pangan	Adanya pembagian kewenangan registrasi antara BAPANAS, Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko usaha	Kurangnya informasi dan jaminan mutu yang diperoleh konsumen terhadap produk pangan yang tidak tersertifikasi dan teregistrasi
Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	9	Balai Sertifikasi dan Mutu Pangan	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
1	2	3	4	5
Terdapat barang milik daerah yang tidak terdata	9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Terdapat aset daerah yang masih dikuasai pihak lain	Operasional aktivitas dapat terganggu
Data kepegawaian tidak terbaru	9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketidakteraturan data pegawai	Potensi kesalahan dalam penetapan hak kepegawaian
Barang tidak memenuhi standar administrasi	9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengadaan tidak sesuai dengan regulasi	Potensi sanksi dan hambatan operasional
Barang milik daerah tidak dapat digunakan	9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan hanya dilakukan ketika barang	Efektivitas kerja perangkat daerah menurun

D. Rencana Tindak Lanjut Pengendalian Terhadap Resiko

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan OPD								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Jawa Tengah	<i>Prevelence of Undernourishment</i> (PoU) Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Ketersediaan dan keterjangkauan pangan tidak merata di setiap wilayah Jawa Tengah	12	<ul style="list-style-type: none"> Potensi masing-masing wilayah berbeda, beberapa daerah tidak dapat menyediakan pangan yang cukup Keterbatasan akses fisik (jarak) dan ekonomi (daya beli masyarakat rendah) Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan B2SA 	produktivitas rendah, kesehatan menurun, stunting, kemiskinan	Pemberian bantuan pangan dan penyaluran komoditas pangan secara kontinyu dan tidak hanya pada komoditas pangan strategis Pemberian subsidi harga pangan untuk masyarakat rawan pangan dan anak berseiko stunting, kegiatan berbagi pangan, koordinasi dengan Bappeda dan OPD untuk penanganan di luar aspek pangan Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA yang lebih masif. Penganekaragaman dalam mengkonsumsi pangan berbahan baku potensi pangan spesifik lokasi, Fasilitasi pelaku usaha pangan lokal. Pengembangan pangan lokal. Gerakan cinta pangan lokal.	Kepala Dinas	2026
		Pangan yang tersedia tidak memenuhi	12	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya edukasi masyarakat 	Masyarakat Mengonsumsi pangan yang	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi keamanan pangan di wilayah POU Tinggi 	Kepala Dinas	2026

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		standar mutu dan keamanan pangan		tentang pangan aman dan bergizi <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen jaminan mutu dan keamanan pangan yang telah diterbitkan 	tidak sesuai jaminan mutu dan keamanan pangan sehingga muncul potensi keracunan pangan, penyakit kronis, dan memperburuk gizi buruk	<ul style="list-style-type: none"> Pelaporan dan tindak lanjut hasil surveilan 		
Sasaran Strategis OPD								
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Ketersediaan energi sudah cukup namun komoditas yang tersedia kurang beragam	12	Jawa Tengah bukan merupakan sentra produksi untuk komoditas tertentu, seperti : bawang putih, kedelai, gula dan minyak goreng.	Komoditas tertentu masih didatangkan dari luar karena ketersediaan dalam daerah belum mencukupi	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Dinas Teknis Produksi untuk optimalisasi produksi komoditas pangan yang masih kurang Pemenuhan kebutuhan pangan yang tidak dapat diproduksi sendiri, dengan impor mendatangkan dari daerah lain baik domestik maupun luar negeri 	Kepala Dinas	2026
Meningkatnya Keterjangkauan Pangan	Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras)	Harga komoditas pangan strategis mengalami fluktuasi tajam	16	Panjangnya rantai distribusi pangan	Terjadinya inflasi	Pengendalian harga melalui pemantauan dan intervensi harga	Kepala Dinas	2026

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan tidak tertangani secara maksimal	9	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan, sedangkan aspek lain masih belum diperhatikan	Desa Rawan Pangan yang ditangani tidak dapat turun ke level prioritas rendah	Koordinasi dengan Bappeda dan OPD terkait penanganan daerah rawan pangan yang membutuhkan bantuan di luar aspek pangan	Kepala Dinas	2026
Meningkatnya Pemanfaatan Pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah	Masih terdapat beberapa kelompok pangan yang masih dibawah / di atas angka konsumsi ideal	16	Pola konsumsi masyarakat belum B2SA, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal masih rendah.	Malnutrisi atau stunting, penyakit tidak menular, status gizi masyarakat	Koordinasi dengan dinas teknis untuk meningkatkan produksi pangan lokal, Rakor analisis skor PPH dengan kabupaten/kota, Sosialisasi/edukasi Pola konsumsi pangan B2SA, Pengenalan pangan lokal substitusi beras dan gandum, promosi pangan lokal melalui media dan pameran, fasilitasi alat bagi pelaku usaha pangan lokal. Pemanfaatan pangan lokal yang lebih masif.	Kepala Dinas	2026
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan								
	Angka Konsumsi Beras Provinsi Jawa Tengah	Bahan pangan selain beras belum menjadi prioritas utama dalam pemilihan bahan pangan	9	Kebijakan pemanfaatan pangan lokal sebagai pengganti atau pangan alternatif selain beras belum maksimal	Konsumsi masyarakat menjadi tidak beragam, dan menjadi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan, dan akan	- Peningkatan inovasi promosi pangan lokal -Peningkatan sosialisasi pola konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui media sosial -Pemberian subsidi harga untuk pangan lokal	Kepala Bidang PKP	1 tahun

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					mempengaruhi skor PPH Provinsi Jawa Tengah			
KEGIATAN								
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Sasaran Stabilisasi Harga Sesuai Dengan SOP	Harga komoditas pangan tingkat konsumen melebihi HET/HAP, sedangkan harga komoditas pangan tingkat produsen dibawah HAP	12	Ketidakstabilan harga komoditas pangan	Daya beli masyarakat menurun dan kelangkaan komoditas pangan	Penyaluran subsidi harga pangan dengan menggandeng BUMD Pangan Provinsi Jawa Tengah	Bidang KSP	1 tahun
	Persentase Peningkatan Kelembagaan Usaha Pangan	Belum optimalnya pengembangan kelembagaan usaha pangan	9	Keterbatasan SDM dan Infrastruktur pelaku usaha pangan	Pelaku usaha pangan belum berkembang secara optimal dari aspek produksi dan pemasaran	Meningkatkan kemitraan pelaku usaha pangan dengan stakeholder terkait dari aspek hulu s/d hilir dengan perluasan wilayah jangkauan	Bidang KSP	1 tahun
	Volume bahan pangan yang difasilitasi pendistribusiannya untuk stabilisasi pasokan	Volume bahan pangan yang didistribusikan tidak dapat menjaga stabilitas pasokan di setiap wilayah	9	Tidak semua wilayah memiliki sumber pangan strategis	Ketidakstabilan pasokan dan harga	Memperluas jangkauan pendistribusian kepada masyarakat	Bidang KSP	1 tahun
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok	Persentase Kabupaten Yang Terfasilitasi	Pola konsumsi masyarakat tidak beragam	12	Ketergantungan dengan salah satu	Menjadikan skor PPH menjadi tidak maksimal dan	Untuk memperluas jangkauan dan sasaran, membuat series	Kepala Bidang PKP	1 tahun

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penguatan Pangan B2SA			bahan pangan (beras)	kurang beragam Status gizi masyarakat menurun	edukasi secara online/daring/zoom meeting		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	Desa Rawan Pangan belum tertangani secara maksimal	9	Intervensi hanya berupa subsidi harga pangan dan bersifat sesaat sehingga belum berpengaruh terhadap aspek yang lain	Desa Rawan Pangan yang ditangani belum dapat naik ke level prioritas yang lebih tinggi	Koordinasi dengan lintas OPD yang mempengaruhi indikator rawan pangan	Kepala Dinas	1 Tahun
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan	Ditemukan produk pangan segar di peredaran yang menyimpang terhadap persyaratan keamanan pangan dan mutu PSAT	9	Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan keterbatasan jangkauan pengawasan PSAT di peredaran	Kesehatan masyarakat terganggu	Peningkatan intensitas pengawasan PSAT dan edukasi	Bidang Keamanan Pangan	1 Tahun
	Capaian Tertimbang Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar	Rendahnya ajuan permohonan sertifikasi dan registrasi pangan oleh pelaku usaha	9	Adanya pembagian kewenangan registrasi antara BAPANAS, Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko usaha	Kurangnya informasi dan jaminan mutu yang diperoleh konsumen terhadap produk pangan yang tidak tersertifikasi dan teregistrasi	pengawasan ke pelaku usaha terkait kepatuhan pelaporan dan penjaminan produk pangan yang tersertifikasi dan teregistrasi	Kepala Balai	1 tahun

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Keamanan Pangan Segar yang Disusun	Sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan belum menjangkau sasaran secara luas	9	pelaksanaan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan masih terbatas	Masih banyak masyarakat yang belum tersosialisasi dan teredukasi keamanan dan mutu pangan	Sinergi jejaring sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan dengan lintas OPD dan Kab/Kota serta pemanfaatan media online secara optimal	Bidang Keamanan Pangan	1 Tahun
	Jumlah Pelaku Usaha / Kelompok yang dibina dalam penjaminan mutu dan keamanan pangan	Kurang optimalnya pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan post market, pembinaan kepada pelaku usaha PSAT dan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat oleh lembaga pengawas mutu dan keamanan kabupaten/ kota	9	Petugas pengawas pada Lembaga pengawas mutu dan keamanan pangan kabupaten/ kota belum memahami dan menerapkan sistem manajemen pengawasan keamanan pangan	Masyarakat mengkonsumsi PSAT yang belum memiliki jaminan mutu dan keamanan pangan	Peningkatan kapasitas pengawas pada Lembaga pengawas mutu dan keamanan pangan di kabupaten/ kota	Bidang Keamanan Pangan	1 Tahun
	Persentase Rekomendasi Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Yang Diterbitkan	Ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	9	Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan mutu dan keamanan yang telah diterbitkan	Produk yang telah teregistrasi tidak sesuai dengan jaminan mutu dan keamanan yang diterbitkan	pengawasan ke pelaku usaha terkait kepatuhan pelaporan dan penjaminan produk pangan yang tersertifikasi dan teregistrasi	Kepala Balai	1 tahun

Tujuan/Sasaran /Program/ Kegiatan PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/ Kegiatan PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KEGIATAN								
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Terdapat barang milik daerah yang tidak terdata	9	Terdapat aset daerah yang masih dikuasai pihak lain	Operasional aktivitas dapat terganggu	Melakukan rapat koordinasi dan klarifikasi data dengan pemerintah kabupaten/kota terkait aset yang dikuasai atau digunakan, untuk memastikan kepastian hukum dan tanggung jawab pengelolaan aset tersebut	Ka. Subbag Umpeg	1 Tahun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan	Data kepegawaian tidak terbaru	9	Ketidakteraturan data pegawai	Potensi kesalahan dalam penetapan hak kepegawaian	Melaksanakan kegiatan desk pemutakhiran data pada unit kerja	Ka. Subbag Umpeg	1 Tahun
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Barang tidak memenuhi standar administrasi	9	Pengadaan tidak sesuai dengan regulasi	Potensi sanksi dan hambatan operasional	Membentuk tim verifikasi administrasi yang memastikan setiap barang yang diterima memiliki dokumen lengkap (BAST, faktur, kontrak, dan bukti pembayaran).	Ka. Subbag Umpeg	1 Tahun
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Barang milik daerah tidak dapat digunakan	9	Pemeliharaan hanya dilakukan ketika barang sudah rusak berat	Efektivitas kerja perangkat daerah menurun	Menetapkan jadwal pemeliharaan rutin (harian, bulanan, tahunan) untuk setiap jenis aset sesuai karakteristik barang.	Ka. Subbag Umpeg	1 Tahun